

TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI KADEK INDRIADNYANI PUTRI
NIM. 1915613151

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022

TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI KADEK INDRIADNYANI PUTRI
NIM. 1915613151

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Indriadnyani Putri
NIM : 1915613151
Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten
Gianyar Terhadap Laporan Keuangan Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gianyar

Pembimbing : 1. Dra. Ni Ketut Masih, MM.
2. Ir. I Gede Made Karma, MT.

Tanggal Uji : 26 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 26 Agustus 2022


Ni Kadek Indriadnyani Putri
NIM 1915613151

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

NAMA. Ni Kadek Indriadnyani Putri

NIM. 1915613151

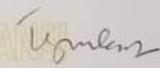
Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Ni Ketut Masih, MM
NIP. 196411291993032001


Ir. I Gede Made Karma, MT
NIP. 196207191990031002

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 26 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Dra. Ni Ketut Masih, MM
NIP. 196411291993032001

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.
NIP. 199007222019032012

3. Dra. Putu Dyah Hadiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Terhadap Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun oleh penulis guna untuk memenuhi syarat utama dalam penyelesaian pembelajaran pada jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberi motivasi, materi atau fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu melalui kesempatan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang sudah memberikan arahan tentang penyusunan Tugas Akhir.
3. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si,Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang juga sudah memberikan pentunjuk penyusunan Tugas Akhir.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE.,M.Agb,Ak., selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan terkait Tugas Akhir.

5. Ibu Dra. Ni Ketut Masih, M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bantuan dalam penentuan topik dan bimbingan dalam tahap penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Ir. I Gede Made Karma, M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membantu dan memberikan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Kedua orang tua dan dua kakak saya yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini ini.
8. Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar, yang telah banyak membantu dan memberikan kesempatan penulis mendapatkan data sebagai informasi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, disadari bahwa Tugas Akhir ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kebaikan tugas akhir ini. Demikianlah Tugas Akhir ini dibuat, agar bermanfaat bagi kita semua. Sebagai akhir kata, diucapkan terimakasih.

Badung, 04 Februari 2022

Penulis

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR**

ABSTRAK

NI KADEK INDRIADNYANI PUTRI

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, merupakan suatu informasi yang diwujudkan melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Pengukuran analisis kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan daerah. Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap Laporan Keuangan Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan lima rasio terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian belanja, dan rasio derajat desentralisasi. Data yang digunakan adalah kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Perubahan APBD tahun anggaran 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian menghasilkan kriteria yang sedang dengan pola partisipatif. Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan kurang efektif, sedangkan untuk rasio efisiensi PAD tidak efisien. Namun, Rasio keserasian belanja menghasilkan kriteria cukup serasi untuk belanja tidak langsung dan kurang serasi pada belanja langsung, dan rasio derajat desentralisasi berada dalam kriteria sedang. Penyebab dari hal tersebut adalah potensi yang ada di Kabupaten Gianyar masih kurang dikelola dengan baik ditambah lagi adanya hambatan karena pandemi Covid-19. Jika pemerintah bisa memaksimalkan untuk meningkatkan potensi tersebut dalam masa pandemi, maka semua komponen Pendapatan Asli Daerah akan bisa meningkat dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar menjadi meningkat di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REGIONAL
GOVERNMENT OF GIANYAR REGENCY TOWARDS FINANCIAL
STATEMENTS AT THE MANAGEMENT AGENCY FINANCE AND
REGIONAL ASSETS OF GIANYAR REGENCY**

ABSTRACT

NI KADEK INDRIADNYANI PUTRI

The Financial Performance Analysis of the Gianyar Regency Government, is an information that is realized through good regional financial management for the welfare of the community. Measurement of government financial performance analysis using ratio analysis of regional finance to regional financial statements. The purpose of conducting this research is to determine the financial performance of the Gianyar Regency government on the Government Financial Statements at the Gianyar Regency BPKAD. The research method used in this research is descriptive quantitative, namely measuring financial performance using five ratios consisting of the ratio of regional financial independence, the effectiveness ratio of PAD, the ratio of PAD efficiency, the ratio of spending harmony, and the ratio of the degree of decentralization. The data used is quantitative in the form of the Budget Realization Report and the Revised Regional Budget for the 2018-2021 fiscal year. Based on the results of the study, it shows that the Independence Ratio produces moderate criteria with a participatory pattern. The PAD Effectiveness Ratio can be said to be less effective, while the PAD efficiency ratio is not efficient. However, the expenditure compatibility ratio resulted in a fairly suitable criterion for indirect expenditure and less suitable for direct expenditure, and the ratio of the degree of decentralization was within the moderate criteria. The cause of this is the potential that exists in Gianyar Regency is still not managed properly plus there are obstacles due to the Covid-19 pandemic. If the government can maximize to increase this potential during the pandemic, then all components of Regional Original Income will be able to increase and the financial performance of the Gianyar Regency Government will increase in the future.

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Report, Regional Financial Ratio

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah kemandirian daerah atau bisa juga diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat sendiri dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah yang bertindak sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah tidak lepas dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Hak pemerintah daerah yang dimaksud adalah mengurus urusan pemerintahannya sendiri, mengelola aparatur milik daerah, memilih pimpinan daerahnya, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Hak yang didapat pasti ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah melindungi masyarakat, menyediakan fasilitas lengkap untuk masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menyusun perencanaan dan tata ruang milik daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hasil yang baik untuk daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah. Pendapatan daerah memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah merupakan semua hal yang

berhubungan dengan tugas dan wewenang yang diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Hal yang mencolok saat diterapkannya otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat. Keuangan daerah yang belum bebas dalam mengambil suatu keputusan, ditambah adanya campur tangan dari pemerintah pusat terhadap pembangunan menjadikan bukti dari ketergantungan pada pemerintah pusat. Pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik sudah berkembang pesat, akan tetapi tingkat ketergantungan daerah dengan pusat yang terjadi semakin tinggi karena pembangunan tersebut semakin besar. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan banyaknya dana yang ditransfer dari pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama yang penting untuk pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi terhadap suatu daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2019). Daerah harus memiliki kemampuan yang teliti dalam memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki. Jika hal yang terjadi adalah sebaliknya, akan berakibat pada kemampuan keuangan daerah yang rendah dan akan menghambat kelancaran pelaksanaan dari otonomi daerah. Faktor dari pendapatan daerah adalah salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan otonomi, nyata dan bertanggung jawab yang tertera pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022. Keterbatasan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah untuk menggali potensi dari keuangan daerah berakibat pada

rendahnya kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan dari keuangan daerah dalam mengelola keuangan terdapat pada APBD yang berisi tentang kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai daerah, seperti pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur daerah.

Pemerintah daerah harus bisa membiayai daerah sebagai pelaksana pengurus rumah tangga sendiri. Maka dari itu, keuangan daerah harus mampu mendukung seluruh pembiayaan daerah, kemasyarakatan, dan pembangunan. Pemerintah telah membentuk peraturan pendukung pelaksana otonomi daerah yang memiliki kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang dilakukan setiap tahun, dengan Laporan Keuangan daerah akan bisa mengetahui sejauh mana suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam pemerintah daerah, cara mengetahui kinerja keuangan suatu daerah adalah menganalisis rasio keuangan daerah menggunakan Laporan Keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri tahun 1996 dan buku karangan Mahmudi terbitan tahun 2019. Rasio keuangan yang dimaksud adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian Belanja Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi dimana kriteria rasio tersebut diukur berdasarkan Kepmendagri Tahun 1996. Pengukuran

untuk kinerja keuangan dilakukan dengan menelaah Laporan Keuangan Pemerintah terutama Laporan Realisasi Anggaran yang menjelaskan tentang kegiatan dari keuangan daerah sebagai bentuk kepatuhan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Gianyar setiap tahunnya mengeluarkan Laporan Keuangan sebagai bukti pengelolaan keuangan daerahnya. Salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran yang menunjukkan jumlah anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan kegiatan di daerahnya seperti, peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan membutuhkan banyak dana daerah. Dana yang dimaksud adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar. Berikut disajikan data Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2018-2021 yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2021

	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Total Pendapatan Daerah
2018	770.204.849.841	1.176.225.864.759	56.216.160.000	2.002.646.874.600
2019	997.478.368.035	1.249.995.766.031	61.397.292.000	2.308.871.426.066
2020	545.869.872.999	1.140.696.383.837	198.170.277.053	1.884.736.533.889
2021	430.172.108.884	1.069.631.880.274	70.144.590.417	2.061.173.137.769
Rata-Rata	685.931.299.940	1.159.137.473.725	96.482.079.868	2.064.356.993.081

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar, data diolah

Tabel di atas menjelaskan tentang perkembangan dari Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar selama empat tahun berturut-turut yang

mengalami fluktuasi. Semua kondisi tersebut terjadi setiap tahunnya pada Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dan Pendapatan Transfer. Komponen Pendapatan Asli Daerah menunjukkan rata-rata sebesar Rp685.931.299.940,00, sedangkan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.159.137.473.725,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp96.482.079.868,00.

Semua nilai rata-rata tahun 2018-2021 menggambarkan daerah tersebut masih bergantung pada dana transfer yang berupa dana perimbangan, tranfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang besar. Meskipun, pemerintah Pusat telah membagikan kewenangan kepada daerah Kabupaten Gianyar untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah ataupun sumber-sumber pendapatan yang lain agar otonomi daerah dapat berjalan lebih baik. Kondisi itu sangat perlu diadakannya pengkajian ulang dimana semua potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Gianyar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki peluang untuk digali lebih lanjut dan dalam. Pemerintah Kabupaten Gianyar yang memiliki kecenderungan tergantung pada dana transfer dan bantuan dari pemerintah pusat menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana pengelolaan keuangan daerahnya dan kinerja keuangannya. Tujuan peneliti yakni untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2018-2021 yang dihitung melalui rasio-rasio keuangan daerah.

Pemilihan Kabupaten Gianyar menjadi fokus penelitian disini karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam periode 2018-2021 mendapatkan opini WTP selama 4 tahun tersebut yang merupakan suatu peringkat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Mendapatkan opini WTP tidak akan menentukan kinerja keuangan suatu daerah sudah optimal atau belum optimal, karena itu hanya akan menentukan suatu Laporan Keuangan Daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu PP No. 71 Tahun 2010. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena masih diperlukan analisis kinerja keuangan Kabupaten Gianyar terhadap laporan keuangan daerahnya. Berdasarkan semua penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Terhadap Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar Terhadap Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa dapat menerapkan teori atau mempraktekan ilmu yang sudah didapat pada bangku perkuliahan dan membandingkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Instansi Pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai hal yang diteliti dan dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi guna kemajuan kurikulum yang ada khususnya di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali sehingga terdapat kesesuaian antara materi perkuliahan dengan fakta yang terjadi.

3. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Gianyar

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan atau masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja keuangan Kabupaten Gianyar adalah belum optimal pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tergantung dengan dana pusat karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar tergolong masih rendah. Maka dari itu, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi tinggi. Hal tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dari sisi rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gianyar dengan tahun 2021 sebagai rasio terendah dan memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya diikuti rata-rata yang menunjukkan kriteria sedang. Hal tersebut terjadi karena PAD yang diterima lebih rendah daripada transfer pusat dan pinjaman yang diajukan daerah.
2. Hasil analisis dari rasio efektivitas PAD cenderung mengalami penurunan, perhitungan rata-rata juga menunjukkan kriteria kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena PAD yang diterima Kabupaten Gianyar masih belum mencapai target yang ditentukan.
3. Hasil analisis dari rasio efisiensi PAD memiliki kecenderungan yang efisien dan rata-rata menunjukkan rasio dengan kriteria efisien. Hal ini dapat diartikan Kabupaten Gianyar sudah bisa menekan biaya

pemerolehan PAD, karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada penerimaan PAD.

4. Analisis rasio keserasian belanja dari tahun anggaran 2018-2021 menunjukkan kecenderungan alokasi belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung, terjadi hal yang sama juga pada perhitungan rata-rata rasio ini. Hal tersebut masih terkendala, karena seharusnya belanja langsung bisa lebih tinggi dari belanja tidak langsung.
5. Hasil dari analisis derajat desentralisasi menunjukkan penurunan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, PAD yang diperoleh sangat rendah sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Daerah masih kecil. Kecenderungan derajat desentralisasi juga menunjukkan rasio sedang dan perhitungan rata-rata juga menunjukkan kriteria sedang, sehingga Kabupaten Gianyar masih berupaya secara maksimal untuk melaksanakan desentralisasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya penerimaan PAD pada Kabupaten Gianyar dapat ditingkatkan lagi. Caranya dengan memanfaatkan potensi sebagai sumber PAD lebih baik, terutama partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Sebaiknya pengelolaan dana pada belanja daerah Kabupaten Gianyar khususnya belanja langsung lebih difokuskan dan ditingkatkan lagi,

karena belanja langsung sangat berpengaruh pada kegiatan daerah secara langsung atau kegiatan internal daerah.

3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah juga sangat diperlukan pada Kabupaten Gianyar, karena hal tersebut akan membantu meningkatkan kinerja keuangan daerah di periode dan tahun anggaran berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2015). Analisis Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(1), 1–17.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996.
- Mahmudi.(2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757* (Issue 104172). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Putra, A. P. A., & Wirawati, N. G. P. (2015). Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(1), 252–268.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1), 40–54.
- Setiawan, D., Widiyanto, A., & Anis F, Y. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 7(1), 83–112. <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/97>
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Administrasi Publik*, Vol.2(No.2), 236–242.